

ISU Sepekan

BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Minggu ke I Bulan Mei 2021 (tanggal 30 April s.d. 6 Mei)



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

MODIFIKASI PERILAKU MASYARAKAT DI PUSAT PERBELANJAAN

Elga Andina

Peneliti Muda/Psikologi

elga.andina@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

Menjelang libur lebaran, kerumunan di pusat perbelanjaan terjadi di berbagai daerah. Salah satunya di Pusat Grosir Tanah Abang. Sebanyak 87 ribu orang datang pada Sabtu 1 Mei 2021, lalu sehari kemudian menjadi 100 ribu. Hal ini menyebabkan antrian panjang pengunjung yang hendak memasuki lokasi perbelanjaan. Padatnya jumlah pengunjung kemudian viral di media massa sehingga menarik perhatian pemerintah daerah. Pemerintah provinsi DKI mengerahkan 2.500 personel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Satpol PP untuk mengurai kerumunan dan menghimbau masyarakat untuk segera pulang setelah berbelanja. Penutupan stasiun Tanah Abang bagi penumpang *commuter line* yang naik dan turun juga dijadikan strategi mencegah penumpukkan massa. Kerumunan di pusat perbelanjaan ini berpotensi menjadi titik awal Klaster Covid-19.

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Unicef, dan relawan yang melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan prokes pada bulan Februari menemukan penurunan kepatuhan masyarakat untuk melakukan 3M. Hal ini disebabkan karena (1) masyarakat jenuh karena pandemi telah berlangsung lebih dari 1 tahun; (2) merasa sudah kebal karena sudah divaksin; (3) adanya celah dalam aturan yang diterapkan sehingga dapat mengabaikan prokes; (4) menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah karena informasi yang berubah-ubah.

Pandemi telah berlangsung selama 14 bulan namun pemerintah masih belum berhasil membentuk perilaku adaptif masyarakat. Kebijakan pemerintah di pusat perbelanjaan masih perlu perbaikan, di antaranya:

1. Tidak adanya intervensi untuk mengetahui apakah ada pengunjung yang terinfeksi, karena tidak ada penyaringan dengan tes sebelum memasuki lokasi perbelanjaan.
2. Ketidaktegasan pemerintah untuk membatasi kapasitas maksimal pengunjung pusat perbelanjaan.
3. Kebijakan penyekatan atau pengurangan yang dilakukan pemerintah tidak efektif karena hanya berfokus bagian hilir dan bersifat reaktif.

Kebijakan penekanan mobilisasi massa tidak memperhatikan aspek psikologis dan sosial masyarakat. Penelitian menemukan adanya orang-orang yang merasa yakin tidak akan tertular dan tidak akan menularkan orang lain sehingga mereka mengabaikan prokes. Membiarkan orang-orang seperti ini akan melemahkan usaha pemerintah untuk menjaga kepatuhan pelaksanaan prokes.

Oleh karena itu, diperlukan beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memodifikasi perilaku masyarakat di pusat perbelanjaan, diantaranya:

1. Buka tutup pintu masuk pusat perbelanjaan untuk mengurangi jumlah pengunjung.
2. Kewajiban antigen untuk menuju tempat keramaian, tidak hanya pengecekan suhu dan penggunaan masker.
3. Meningkatkan harga antigen/PCR sehingga akan menurunkan jumlah orang yang dapat mengakses tempat perbelanjaan.
4. Pelanggaran prokes harus segera ditindak tanpa pengecualian untuk menyampaikan pesan yang konsisten mengenai pentingnya prokes.
5. Menyampaikan informasi yang sama di semua kanal media pemerintah.
6. Menyampaikan informasi yang sama oleh setiap pihak yang berwenang (menteri, satgas, pemda).

SUMBER

Baharom, S. N., dkk. IMDES 2020, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Volume 502; <https://doi.org/10.3390/healthcare9020151>; <https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110491>; Tempo.co, 7 Februari 2021; Sindonews, 4 Mei 2021; tirtoid, 4 Mei 2021.